

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, jika membicarakan tentang sistem perekonomian global, kehidupan masyarakat internasional tidak dapat dilepaskan dari apa yang dinamakan sebagai *World Trade Organization* ( WTO ). Hal ini disebabkan karena WTO merupakan sebuah organisasi global yang mengatur tentang segala perekonomian yang mencakup dunia internasional. Semua negara-negara yang berada dalam keanggotaannya wajib mengikuti segala aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi tersebut.

Pendirian WTO merupakan sebuah implementasi prinsip neo-liberalisme yang di percayai sebagai solusi yang bisa menjawab semua permasalahan dunia internasional. Pada dasarnya neo-liberalisme adalah sebuah reaksi terhadap membesarnya peran negara yang menyebabkan kehancuran sistem pasar. Jalan keluar yang diusulkan oleh aktor-aktor neoliberalisme adalah melucuti peran negara dan mengembalikan semua transaksi ekonomi ke dalam hukum pasar.<sup>1</sup> Tidak hanya itu, sistem ini mencoba memasukan semua unsur kehidupan seperti sektor pertanian, pendidikan, jasa, kesehatan dan lain-lain ke dalam perdagangan pasar, dengan di kurangnya peran negara, maka sistem ini lebih banyak di kuasai oleh pihak swasta seperti *Multinational Corporation* ( MNC ).<sup>2</sup>

Sejak terbentuknya *World Trade Organization* (WTO) yang merupakan hasil Perundingan Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang diselenggarakan

---

<sup>1</sup>Kapitalisme dan Neoliberalisme. Sebuah Tinjauan Singkat1, Eko Prasetyo, Ekonomi Politik Journal Al-Manâr Edisi I/2004, hal 4.

<sup>2</sup>Multinational Corporation (MNC) adalah suatu perusahaan yang mempunyai skala besar (*Large economies of scale*) dan mempunyai cabang-cabang di beberapa negara serta usahanya/aktivitasnya kadang-kadang lebih dari satu. negara-negara di mana cabangnya berada sering di sebut dengan *Home Countries* dan Negara di mana pusat perusahaannya berada disebut Host Countries.

dalam kerangka *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT),<sup>3</sup> dan dimulai pada September 1986 di *Punta del Este, Uruguay* dan berakhir pada 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko.<sup>4</sup> Maka perdagangan global secara lembaga yang dikatakan sebagai awal terbentuknya sistem ekonomi menuju pasar bebas yang adil pun dimulai.

Selain menandatangani beberapa peraturan perdagangan yang ada dalam GATT, seperti, kesehatan dan keamanan produk dagang (SPS/*Sanitary and Phytosanitary*), Tindakan investasi terkait dengan perdagangan (TRIMs), tindakan anti-dumping, badan pemantau tekstil (*Textile and Clothing*), tindakan pengamanan (*Safeguard*), standar produk. WTO juga telah mengeluarkan sebuah regulasi yang sangat penting dan telah diratifikasi oleh semua negara anggotanya, yaitu *Agreement on Agriculture* (AoA) pada tanggal 1 Januari 1995. Adapun AoA adalah sebuah aturan tentang perdagangan sektor pertanian global yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen hukum WTO. Setidaknya terdapat tiga komitmen dalam AoA, berikut “( 1) Perluasan akses pasar, ( 2 ) pengurangan subsidi domestik, ( 3 ) dan pengurangan subsidi impor, ditambah satu klausula perlakuan khusus dan berbeda bagi Negara Berkembang.”<sup>5</sup>

AoA, secara garis besar sangat berpengaruh bagi semua negara-negara anggota terutama Negara-negara Berkembang (*Developing Countries*). Negara-negara anggota diharuskan menerapkan segala aturan yang berlaku dalam kesepakatan AoA tersebut. Perjanjian berpengaruh terhadap petani-petani yang berada di Negara-negara berkembang, seperti, (i) Jutaan petani telah dipaksa untuk meninggalkan lahan pertanian mereka karena pengambilan lahan yang difasilitasi oleh kebijakan nasional/militer untuk pembangunan industri skala besar, (ii) Negara mengabaikan keadaan di mana sektor pertanian dan petani menerima pendapatan yang tidak layak dari hasil produksi pertaniannya, (iii) Petani telah kehilangan benih-benih lokal. Keanekaragaman hayati dihancurkan oleh

---

<sup>3</sup>*General Agreement on Tariff and Trade* adalah sebuah perjanjian internasional yang memajukan perdagangan di antara Negara-negara anggotanya dengan menjadikan diri sebagai fora untuk menundingkan kesepakatan guna mengurangi bea tariff serta kendala perdagangan lainnya.

<sup>4</sup><http://rachmihertanti.blogspot.com/2011/07/agreement-on-agriculture-dan-dampaknya.html> akses jam 01.33 WIB tanggal 5 September 2012

<sup>5</sup>Ibid

penggunaan pupuk kimia, benih hibrida, insektisida, dan organisme-organisme yang dimodifikasi secara genetika (Transgenik atau GMOs). Yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, (iv) Jutaan petani hidup dalam kelaparan dan malnutrisi. Hal ini bukan karena jumlah pangan yang ada di dunia tidak cukup, tapi karena sumber-sumber pangan di dominasi oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Petani dipaksa untuk menghasilkan pangan untuk ekspor dari pada menghasilkan pangan untuk masyarakatnya.<sup>6</sup>

Ada beberapa faktor yang menyebabkan aturan *Agreement on Agriculture* (AoA) tidak cocok bagi semua negara-negara anggota, terutama Negara Dunia Ketiga. *Pertama*, ketidakseimbangan tingkat pembangunan ekonomi, teknologi, ketrampilan Sumber daya manusia, dan infrastruktur antara Negara Maju dan Negara Berkembang menyebabkan ketidakmampuan Negara Berkembang menciptakan *equal playing field*.<sup>7</sup> *Kedua*, MNC sendiri sebagai aktor yang sangat berperan dalam perjanjian sektor pertanian global tersebut juga merupakan biang masalah, kecenderungan MNC yang selalu menginginkan keuntungan yang besar telah membuat mereka menempuh jalan instan yang akhirnya merusak lingkungan sendiri dan menyengsarakan nasib petani melalui dominasi harga dan rekayasa genetika produk-produk pertanian. *Ketiga*, diminimalisirnya peran negara dalam memproteksi petaninya telah membuat mayoritas petani-petani di Negara Berkembang semakin terancam. Ini dikarenakan secara teknologi mereka sudah kalah dengan industri pertanian global yang bisa memproduksi secara massal.

Indonesia sendiri sebagai negara anggota telah meratifikasi perjanjian AoA melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1994. Dengan itu Indonesia secara sah harus mematuhi segala peraturan AoA. Sebagai implikasi dari perjanjian tersebut Indonesia yang masuk dalam kesepakatan tersebut secara langsung memenuhi beberapa komitmen ekonomi-politik AoA. *Pertama*, perluasan pasar. Pemerintah Indonesia harus menerima kenyataan bahwa pasar domestik bisa diintervensi oleh produk pertanian negara lain. *Kedua*, subsidi domestik. Dalam nota kesepakatan AoA, setiap negara harus mengurangi beban subsidi bagi petani

---

<sup>6</sup>Booklet SPI, Muhammad Ikhwan, Usir WTO dari Pertanian : Perjuangan Rakyat Menuju KTM VII WTO. Serikat Petani Indonesia (SPI) 2010. Hal 17-18.

<sup>7</sup>Sawit, 2003

dan pertanian agar subsidi dari negara tidak mendistorsi pasar. Sejak 1998, pemerintah akhirnya mencabut subsidi atas input-input pertanian, termasuk subsidi pupuk, benih atau pun racun hama. *Ketiga*, pengeliminasian peran STE (*State Trading Enterprises*). Negara yang menyepakati perjanjian pertanian AoA harus menghapus peran monopoli Bulog (Badan Usaha Logistik) dalam proses distribusi dan jual beli produk pertanian melalui Keppres No 19 tahun 1998.<sup>8</sup>

Beberapa tahun terakhir, tepatnya awal tahun 1990-an di Indonesia khususnya di Sumatera Barat telah muncul sistem Pertanian Organik yang terus berkembang hingga saat. Pertanian organik ini dipraktikkan oleh beberapa petani pada waktu itu yang akhirnya membentuk sebuah organisasi yang diberi nama Persatuan Petani Organik (PPO). Mereka inilah yang akhirnya bersama-sama menyebarkan ide-ide pertanian organik di Sumatra Barat. Ini bisa dilihat dari semakin banyaknya para petani Sumatra Barat beralih dari pertanian konvensional menuju gaya bertani organik yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Selain pengaruh dari petani PPO tadi, munculnya fenomena ini tidak terlepas dari semakin tidak stabilnya harga pupuk dan pestisida sementara harga produk pertanian relatif stabil yang merugikan petani di tambah dengan kerusakan lingkungan yang dihasilkan produk-produk kimia pertanian yang diproduksi perusahaan-perusahaan industri global, hal ini juga di picu dengan trend gaya hidup yang sehat dan sadar lingkungan atau yang akrab di sebut “*back to nature*”.<sup>9</sup>

Dalam mengembangkan pertanian organik ini, PPO bahu-membahu dengan semua pihak yang dianggap peduli dan mempunyai kesamaan prinsip dengan sistem pertanian organik. Membentuk aliansi dalam memperluas wilayah pertanian organik di Sumatra Barat adalah strategi yang dilakukan. Ini dilakukan dengan semua kelompok yang mempunyai kesamaan prinsip dengan gerakan ini, seperti Pusat Pelatihan Pertanian dan Pemberdayaan Swadaya (P4S), Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA), NGO FIELD Indonesia, dan dari golongan mahasiswa yang waktu itu diwakili oleh Komunitas Kajian Kritis Limau Manih (KAKI LIMA). Aliansi ini akhirnya membentuk sebuah tatanan yang lebih besar

---

<sup>8</sup>Ibid

<sup>9</sup>Pertanian Organik : *Kehidupan adalah Hidup yang Organik, Sejahtera, Sehat, dan Lestari*. Penerbit Dinas Pertanian tanaman pangan Propinsi Sumatra Barat, hal 42

dalam pengembangan pertanian organik ini. Pertanian organik bertujuan untuk melepaskan petani-petani dari cara bertani konvensional (masih memakai pupuk, benih transgenik, dan insektisida) dan membawa kepada cara bertani organik (memanfaatkan apa yang ada di alam)

Strategi yang dilakukan dalam melaksanakan hal tersebut adalah dalam bentuk Sekolah Lapangan (SL) dan mendirikan sebuah wadah pertemuan yang besar untuk petani akar rumput dan para pihak yang peduli dengan nasib petani. Wadah tersebut diberi nama sebagai Galanggang Alam Petani Organik (GAPO) Sumatra Barat. Dalam perjalanannya, GAPO telah dilangsungkan sebanyak tiga kali semenjak pertama dilaksanakan pada tahun 2011. GAPO I diadakan di Kota Padang tahun 2011, GAPO II di Kab. Agam tahun 2012, dan GAPO III di Kab. Pesisir Selatan tahun 2013.

## **1.2. Rumusan Masalah.**

Berkembangnya pertanian organik di Sumatra Barat, merupakan fenomena yang sangat menarik untuk di teliti, dikarenakan pertanian organik ini muncul dan mulai berkembang seiring dengan diberlakukannya regulasi AoA-WTO. Dalam prakteknya, pertanian organik di masyarakat telah bertransformasi ke dalam bentuk kelompok/organisasi tani (Gapoktan), dan ini menyebar di berbagai daerah di Sumatra Barat, seperti kelompok tani Rezki abadi, Kelok Jaya (Pesisir Selatan), Lurah Sepakat, Sehati, Selendang Marapi (Agam), Pangan Saiyo Organik, Gapoktan Subuladang, dan Baliek Mayang (Kab. 50 Kota), adapun hasil produksi mereka berupa tanaman pangan dan juga sudah ada yang bisa langsung mendistribusikan ke pasar secara mandiri.<sup>10</sup>

Berbeda dengan gerakan-gerakan yang sudah ada, gerakan pertanian organik di Sumatra Barat yang awalnya digerakkan oleh beberapa intelektual dalam bidang ini lebih mengutamakan kemandirian dari pada memilih untuk melakukan demonstrasi dan menentang kebijakan pemerintah secara langsung. Intelektual petani tadi bersatu membentuk sebuah organisasi yang dinamai Persatuan Petani Organik (PPO). Dalam membangun gerakannya, PPO

---

<sup>10</sup><http://galanggangalampetaniorganik.blogspot.com/> akses tanggal 28 September 2012 pada jam 23.21 WIB

membangun sebuah aliansi gerakan yang lebih besar dengan mengajak beberapa organisasi gerakan dan NGO, yaitu; Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S), Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA), NGO FIELD Indonesia, dan Organisasi Mahasiswa Komunitas Kajian Kritis Limau Manih (KAKI LIMA).

Dengan semakin berkembangnya gerakan tersebut, maka terbentuklah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh para petani tersebut, seperti :Mendirikan Sekolah Lapangan, Memberdayakan Kelompok Tani, Pusat Belajar Rakyat, Galanggang Alam Petani Organik yang dilaksanakan dengan metode pendidikan partisipatif. Semua kegiatan yang telah berjalan tersebut bertujuan untuk mencapai suatu kemandirian bagi petani, mulai dari sistem produksi, Distribusi, hingga Konsumsi agar terlepas dari liberalisasi pertanian. Hal ini semakin menjadi menarik bagi peneliti dalam mengungkap keberadaan gerakan pertanian organik tersebut. Hal yang menjadi titik acuan peneliti dalam meneliti adalah apakah gerakan tersebut berkaitan erat dengan liberalisasi pertanian yang telah ditetapkan melalui regulasi WTO dalam kerangka kerja sama *Agreemen on Agriculture* (AoA).

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Secara garis besar pertanyaan yang dikemukakan berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu :

1. Apakah gerakan pertanian organik di Sumatra Barat merupakan *Counter Hegemoni* terhadap *Agreement on Agriculture* (AoA) yang terdapat dalam regulasi *World Trade Organization* (WTO).
2. Bagaimana gerakan pertanian organik ini dilakukan dan ide-ide apa saja yang dibawa dalam membangun gerakan tersebut.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Melalui penelitian ini penulis ingin : ( 1 ) mendeskripsikan tujuan dan bentuk gerakan pertanian organik yang ada di Sumatra Barat ( 2 ) menganalisis dan menginterpretasikan gerakan tersebut melalui pemahaman yang dimiliki oleh peneliti.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Melalui tulisan ini setidaknya peneliti ingin memberikan kontribusi keilmuan terhadap beberapa elemen, seperti :

1. Secara Teoritis
  - Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi dalam memperkaya keilmuan, terutama dalam ilmu dan konsep Gerakan Sosial, terutama tentang *counter hegemoni*.
2. Secara Praksis
  - Pemerintah (Nasional dan Global), peneliti mengharapkan dengan membaca hasil penelitian ini, para pengambil kebijakan, terutama yang pro terhadap petani bisa lebih memikirkan nasib petani dalam mengambil kebijakan nasional maupun Global. Karena berbicara pertanian sangat erat kaitannya dengan kelangsungan hidup manusia.
  - Petani, peneliti mengharapkan dengan membaca hasil penelitian ini, para petani hendaknya lebih semangat dalam melakukan gerakan kemandirian, karena hanya dengan itulah para petani bisa berdaulat dengan modalnya sendiri.

### 1.6. Studi Pustaka

Telah banyak para sarjana dan ahli sosial meneliti tentang keberadaan WTO dengan semua regulasi-regulasi di dalamnya termasuk AoA dan pengaruhnya terhadap negara-negara anggota terutama negara Dunia Ketiga dan gerakan-gerakan sosial dalam menentang kecurangan dari implementasi-implementasi regulasi tersebut. Dalam studi pustaka ini peneliti bermaksud untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah membahas fenomena ini sebelumnya, baik yang berkaitan langsung maupun berkaitan secara tidak langsung. Dalam pencariannya, penulis menemukan beberapa jurnal, skripsi, hasil penelitian, dan buku yang di anggap relevan.

Tabel 1.1 Perbandingan Fokus Penelitian

No	Nama dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian
1.	Husni Malian, <i>Kebijakan Perdagangan Internasional Komoditas Indonesia</i> (2004).	Tiga Prinsip AoA-WTO yang sangat tidak berpihak terhadap Negara Dunia Ketiga, yaitu ; ( 1 ) Akses pasar ke negara maju

		<p>relatif lebih sulit bagi negara berkembang, ini di akibatkan sejak awal negara maju telah memiliki “Initial tariff rate” yang jauh lebih tinggi ; ( 2 ) Dengan kekuatan kapital yang di miliki negara-negara maju telah menyediakan subsidi ekspor dan subsidi domestik yang tinggi, untuk mendorong ekspor dari surplus produksi komoditas pertanian ; ( 3 ) Dalam AoA-WTO tidak terdapat fleksibilitas yang memadai bagi negara-negara berkembang untuk melakukan penyesuaian tarif, yang sejalan dengan perkembangan permasalahan dan lingkungan strategis perdagangan komoditas pertanian di negara itu. Dalam kondisi demikian kekhawatiran akan kebuntuan perundingan-perundingan tahap berikutnya terus membayang.</p>
2.	<p>Wahyudi Jafar, <i>Pengaruh Ratifikasi Agreement on Agriculture Terhadap Regulasi Pangan Nasional</i> (2012).</p>	<p>Bagaimana doktrin neoliberalisme disampaikan melalui institusi-institusi neoliberalisme melalui Agreement on Agriculture WTO yang telah membuat kondisi negara-negara Dunia Ketiga dalam kondisi dilematis.</p>
3.	<p>Mansour Fakih, <i>Neoliberalisme dan Globalisme</i> (2004).</p>	<p>Ide-ide globalisasi yang merupakan proses pesatnya perkembangan kapitalisme yang ditandai dengan globalisasi pasar, investasi, dan proses produksi dari perusahaan-perusahaan Transnasional (TNC/Transnational Cooperation) dengan dukungan lembaga keuangan internasional (IMF dan World Bank) dan diatur dalam</p>



		organisasi perdagangan global (WTO).
4.	Sopian Sitepu, <i>Respon Petani Terhadap Neoliberalisme (Studi Kasus : Gerakan Petani Serikat Petani Sumatra Utara)</i> .	Bagaimana liberalisasi perdagangan yang telah menyebabkan impor secara besar-besaran sehingga merusak kehidupan petani gurem (petani kecil). Dengan keadaan seperti ini, maka muncullah sebuah gerakan dari para petani yang bertransformasi menjadi sebuah gerakan untuk melawan penindasan yang di lakukan oleh rezim-rezim neoliberal tersebut, dan juga merupakan gambaran kekecewaan terhadap pemerintah yang tidak mampu menjamin kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya, maka lahirlah sebuah serikat petani yang di namakan Serikat Petani Sumatra Utara (SPSU).
5.	Coen Husein Pontoh, <i>Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga (Pendudukan tanah dan demokratisasi di Zimbabwe : Kontradiksi neoliberalisme)</i> (2005).	Pengalaman Zimbabwe mengenai pentingnya gerakan sosial yang berbeda, meskipun peran dan aksi mereka jadi boleh bertentangan, mereka juga bisa menyediakan dasar bagi isu-isu semacam demokratisasi dan <i>land reform</i> untuk gerakan progresif. Namun mereka juga bisa menimbulkan dampak negatif dalam bentuk kekerasan dan penghapusan hak-hak sipil. Di Zimbabwe, bisa di harapkan bahwa efek-efek demikian relatif berjangka pendek, di banding dengan manfaat jangka panjang mengakhiri luka sejarah dan menjawab sebuah masalah yang telah di ingkari selama 20 tahun oleh model rekonsiliasi yang tidak mencakup keadilan dan perbaikan
6.	Benni Wijaya, <i>Gerakan Pertanian</i>	Munculnya suatu perjuangan kolektif yang

<p><i>Organik Sumatra Barat Sebagai Gerakan Counter Hegemoni Terhadap Liberalisasi Pertanian Global di Indonesia</i> (2013).</p>	<p>bersifat politik-kultural dan tetap berpedoman pada sosial-ekonomi yang diberi nama sebagai gerakan pertanian organik yang diakibatkan efek buruk perdagangan bebas oleh institusi global WTO, IMF, World Bank dan perusahaan bisnis global (MNC/TNC) melalui peran-peran negara utara.</p>
--	--

Sumber : Penulis

### **1.7. Kerangka Teori Dan Konsep**

Dalam memakai teori dan konsep dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti akhirnya memilih aliran postpositivisme dengan menggunakan pendekatan teori kritis. Hal ini sangat relevan dengan tujuan penelitian ini, yakni untuk berpartisipasi dalam mendorong perubahan masyarakat dengan menampilkan kasus Gerakan Pertanian Organik di Sumatra Barat. Dan membongkar dominasi dari rezim neoliberal yang bersifat struktural, kekuasaan dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan dikursus lain. Berbeda dengan positivist yang memandang realitas sebagaimana adanya, postpositivist lebih melihat kepada adanya peran subjek.

Teori kritis berkaitan erat dengan Ekonomi Politik Marxis. Teoritisi teori kritis menolak tiga postulat dasar positivisme : Realitas eksternal objektif, perbedaan subjek/objek, dan ilmu sosial bebas nilai. Bagi teori kritis, pengetahuan bukan dan tidak bisa netral baik secara moral maupun secara politik atau ideologi. Semua pengetahuan mencerminkan kepentingan dari para pengamat.<sup>11</sup>

Teori kritis tidak terbatas pada suatu pengujian negara dan sistem negara tetapi memfokuskan lebih luas pada kekuatan dan dominasi di dunia secara umum. Teoritisi mencari pengetahuan untuk tujuan politis, untuk membebaskan kemanusiaan dari sturktur dan ekonomi dunia yang menekan yang dikendalikan oleh kekuatan hegemon, khususnya negara kapitalis Amerika Serikat.

<sup>11</sup>Robert Jackson & Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional (terjemahan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. Hal. 299.

Orientasi mereka adalah menuju perubahan progresif dan keinginan mereka menggunakan teori untuk menolong dan membawa perubahan tersebut juga merupakan pengenalan idealisme. Teoritis kritis secara terbuka adalah politis, mereka menganjurkan dan memajukan ideologi progresifnya (biasanya sosialis) atau emansipasi yang yakin bahwa ilmuwan konservatif dan ilmuwan liberal mempertahankan dan memajukan nilai-nilai politisnya.<sup>12</sup>

Dari sekian banyak pilihan teori yang ditawarkan oleh teori kritik sendiri, akhirnya penulis mengambil teori Hegemoni yang dipopulerkan seorang kritikus dari Italia yang bernama Antonio Gramsci yang didalam studi Hubungan Internasional. Konsep hegemoninya diperdalam oleh Robert Cox yang tergabung dalam teori kritis. Dalam pengertian lainnya, Robert Cox juga dianggap sebagai Neo-Gramscian.

### **1.7.1. Gerakan Sosial**

Gerakan sosial pada dasarnya adalah sebuah mobilisasi massa yang belum termobilisasi. Namun biasanya ketidakaktifan massa ini tidak menghalangi bagi para pelaku untuk memanfaatkannya. Tanpa sumber daya dan organisasi, pada kenyataannya, mobilisasi mungkin tidak dapat dilakukan. Gerakan sosial yang terdiri dari penentang yang berada di luar *mainstream* pemerintahan. Gerakan sosial selalu berupaya untuk menciptakan perubahan dalam sistem, dalam distribusi sumber daya atau kebijakan, atau dalam komposisi pemerintahan negara. Dengan demikian, gerakan sosial sering menentang kebijakan untuk membuat beberapa dari perubahan.<sup>13</sup>

Kata “Gerakan Sosial” sendiri diperkenalkan pertama kali pada 1848 pada oleh Sosiolog Jerman, Lorenz Von Stein dalam bukunya yang berjudul “*Socialist & Communist Movement since the Third French Revolution*” . Pada saat itu gerakan sosial bersifat *massive* dan biasanya timbul dengan maksud penolakan

---

<sup>12</sup>Ibid. Hal. 300.

<sup>13</sup>Arnold K. Sherman and Aliza Kolker, *The Social Bases of Politics*, Wadsworth Publishing Company Belmont, California A Division of Wadsworth, inc. George Mason University, California. Hal 235

ataupun perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.<sup>14</sup>

Tahap awal dari pergerakan sosial adalah pernyataan secara penuh kepada publik bahwa kondisi sosial dan pemegang kekuasaan secara terang-terangan melanggar nilai-nilai sosial yang dihargai, kepentingan masyarakat itu sendiri, dan kepercayaan publik, pemicu peristiwa menanamkan sebuah pandangan moral yang mendalam dan mengecewakan masyarakat umum. Sebagai konsekuensinya masyarakat menanggapi dengan emosi yang meluap-luap, permintaan penjelasan dari pemegang kekuasaan dan siap menunggu informasi lanjutan dari oposisi.<sup>15</sup>

Dawson dan W. E. Gettys mengurut ada lima tahap siklus hidup gerakan sosial. Tahap pertama, *Unrest*, ditandai dengan kebosanan, kegelisahan, rasa ketidakadilan, dan gangguan terhadap hidupan. Kedua, *Excitement*, kerusuhan menjadi fokus pada kondisi tertentu, dan ketika penyebab tersebut teridentifikasi, isu tersebut akan dibuat mengudara. Tahap ketiga, *Formalization*, tercapainya kerja yang berkesinambungan diantara mereka, penggalangan dana yang sistematis, dan ideologi yang sudah jelas. Menurut Dawson dan Gettys, para aktor ini mengkonversi massa yang bersemangat ke dalam barisan. Pada tahap empat, *Institutionalization*, pengembangannya sudah terpola dengan pasti, tradisi telah terbentuk dengan mapan, dan sudah adanya kepentingan yang jelas, dan adanya rasa saling mendukung satu sama lain di dalam anggota, dan birokrasi yang baik bisa menggantikan semangat untuk pemimpin. Dan tahap kelima yaitu tahap terakhir adalah *dissolution*, yaitu pembubaran dari organisasi tersebut setelah tercapai tujuan awal.<sup>16</sup>

Perjuangan untuk menegakan demokrasi harus dimiliki sebagai salah satu tujuan utama pembentukan masyarakat politik yang demokratis, partai-partai politik yang demokratis, dan mekanisme yang kampanye yang melaluinya

---

<sup>14</sup><http://generaksi.org/> akses pada pukul 00.53 WIB tanggal 10 Desember 2012

<sup>15</sup>Bill Moyer. Penerjemah . Fatikahsari. Merencanakan Gerakan Sosial :Kerangka Strategis yang menggambarkan delapan tahap keberhasilan dari gerakan sosial (Yogyakarta : Pustaka Jogja Mandiri). ISBN 979-98129-7-6. Hal 44

<sup>16</sup>Ibid. Hal 237

persaingan untuk menduduki posisi politik yang berproses yakni dengan pemilihan yang teratur, bebas, jujur, adil dan dalam suasana damai.<sup>17</sup>

Setelah melihat definisi dari penteorinya di atas, bisa didefinisikan terminus gerakan sosial menunjuk pada suatu kelompok atau organisasi yang berada di luar mainstream sistem pemerintahan yang berlaku. Dengan demikian gerakan sosial lebih tampak sebagai suatu bentuk tindakan oposisi atas status-quo. Gerakan sosial setidaknya memiliki lima karakter utama, *pertama*, tindakan kolektif, *kedua*, bertujuan, *ketiga*, terorganisir dan berada di luar struktur, *keempat* bersifat spontan, *kelima* menginginkan perubahan dan menentang *status-quo*, Namun kiranya perlu dicatat gerakan sosial berbeda dengan gerakan politik meskipun pada ranah yang berlainan memiliki pertautan yang begitu erat dan tidak terpisahkan. Gerakan sosial umumnya lahir dan diinisiasi oleh beberapa individu atau kolektif dalam masyarakat, semisal kaum intelektual, cendekiawan, kelompok atau organisasi yang memiliki kesadaran berikut perhatian terhadap masyarakat dan lingkungannya.

### **1.7.2. Gerakan Sosial Baru**

Pada tahun 1960-an dan 1970-an masyarakat Amerika dan Eropa menyaksikan munculnya gelombang gerakan berskala luar di seputar isu yang berwatak humanis, kultural, dan non-materialistik. Tujuan dan nilai-nilai gerakan ini umumnya bersifat universal. Aksi-aksi mereka diarahkan guna membela eksistensi dan melindungi kondisi kemanusiaan demi masa depan kehidupan yang lebih baik, tidak seperti gerakan sosial ‘lama’ di masa silam, yang ‘baru’ dan lebih berorientasi isu ini (Gerakan Sosial Baru) tidak melibatkan dirinya pada wacana ideologis yang meneriakkan ‘anti-kapitalisme’, ‘revolusi kelas’, dan ‘perjuangan kelas’. Malah gerakan baru tidak tertarik pada gagasan revolusi dan penggulingan sistem pemerintahan negara revolusioner.<sup>18</sup>

Tujuan dan strategi gerakan baru cuma sedikit persamaannya dengan gerakan di masa lalu yang berjuang untuk isu seperti kenaikan upah buruh dalam

---

<sup>17</sup>Larry Diamond, *The Democratic Revolution*. (New York : Freedom House, 48 East : 21<sup>st</sup>, 1992). Hal 10

<sup>18</sup>Rajendra Singh, Teori-teori sosial gerakan baru dalam Wacana jurnal ilmu sosial Transformatif, Menuju gerakan Sosial Baru, edisi 11 tahun III 2002, Yogyakarta : INSIST Press, ISSN 1410-1289, Hal 16.

industri dan perlawanan terhadap ketimpangan ekonomi dan eksploitasi kelas. Gerakan kontemporer pada umumnya tidak mendukung potensi munculnya ‘pemberontakan petani’ atau ‘perjuangan agraria’.<sup>19</sup>

Gerakan sosial baru (GSB) merupakan istilah yang dikembangkan oleh tokoh sosiologi Prancis, Alain Touraine pada tahun 1975 dan sosiolog Italia Alberto Melucci pada tahun 1980. Gerakan sosial baru mengklaim sebagai gerakan sosial yang berbeda dari paradigma gerakan sosial konvensional.

Yang baru dari gerakan ini adalah yang mereka perjuangkan tidak hanya terpaku pada redistribusi ekonomi atau gerakan kelas sosial. Berbagai isu yang diperjuangkan gerakan sosial ini, misalnya perjuangan untuk hak asasi manusia, perjuangan hak-hak kelompok gay, hak-hak perempuan, dampak globalisasi, dan sebagainya. Agenda yang diperjuangkan gerakan sosial baru mencakup kepentingan yang lebih luas dan mereka beraksi di luar mainstream politik.<sup>20</sup>

Lebih lanjut, Antonio Gramsci menyatakan bahwasanya, gerakan sosial bukan hanya terletak dalam determinasi ekonomi saja seperti apa yang dikatakan oleh Marx, akan tetapi melalui teori hegemoninya Gramsci coba menjelaskan bahwa semua menyangkut, sosial, politik, ekonomi dan budaya. Dalam menganalisis hal tersebut Gramsci menampilkan konsep *Historical Bloc*, karena Gramsci menganggap Hegemoni adalah suatu padanan yang komplet dari semua elemen tersebut. Dalam menjelaskan sebuah gerakan, Gramsci lebih memfokuskan kepada ”moral dan intelektual”, karena menurutnya hanya dengan itu sebuah hegemoni dari kapitalis bisa dilawan.

Guna meunjukkan beberapa tampilan utama Gerakan Sosial Baru, para akademisi dalam bidang sosial umumnya mencoba melacak kebaruan GSB, baik dalam berubahnya hubungan antara masyarakat sipil dan negara, atau dalam berubahnya tatanan dan representasi masyarakat kontemporer itu sendiri, berikut beberapa jenis ideal ciri GSB yang dapat di kenali.

*Pertama*, kebanyakan GSB menaruh konsepsi ideologis mereka pada asumsi bahwa masyarakat sipil tengah meluruh, ruang sosialnya mengalami

---

<sup>19</sup>Ibid.

<sup>20</sup><http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2226215-gerakan-sosial-baru/> akses jam 15.03 WIB pada tanggal 14 November 2012.

penciutan dan yang sosial dari masyarakat sipil tengah di gerogoti oleh kemampuan kontrol negara. Ekspansi negara dalam kehidupan kontemporer ini, bersesuaian dengan ekspansi pasar. Negara dan pasar dilihat sebagai dua institusi yang sedang menerobos masuk nyaris ke dalam seluruh aspek kehidupan warga. Dibudakkannya, berhadapan dengan aparatus negara, dan berhadapan dengan daya hisap pasar dan komoditi melalui revolusi komunikasi, membuat hidup bersama dengan anasir itu, negara dan pasar, menjadi terlampaui meletihkan dan tidak manusiawi. Kian tumbuhnya ketergantungan manusia pada negara dan pasar, pada sistem komunikasi yang memaknai 'informasi adalah kuasa' tanpa menyadari kemungkinan interpretasi andaian tersebut sebagai 'kuasa adalah informasi'-misalnya, mereka yang punya kuasa, memiliki kontrol terhadap informasi tampil menjadi sekumpulan kekuatan sosial baru.<sup>21</sup>

*Kedua*, secara radikal GSB mengubah paradigma Marxis yang menjelaskan konflik dan kontradiksi dalam istilah 'kelas' dan konflik kelas. Pikiran akademisi kiri menyajikan gugatan pada sistem paparan Marxis materialis tentang gerakan dan perubahan dalam masyarakat. Sebuah gugatan atas disingkirkannya isu gender, ekologi, ras, kesukuan, dsb. GSB mencari jawaban atas pertanyaan yang terkait dengan perdamaian, perlucutan senjata, polusi nuklir, perang nuklir, yang berhubungan dengan ketahanan planet ( Bumi ), ekologi, lingkungan dan hak-hak asasi manusia.<sup>22</sup>

*Ketiga*, dengan beberapa pengecualian seperti kelompok hijau dan partai hijau Jerman, GSB umumnya melibatkan politik akar rumput, aksi-aksi akar rumput, kerap memprakarsai gerakan mikro kelompok-kelompok kecil, membidik isu-isu lokal dengan sebuah dasar institusi. Merujuk Cohen, GSB secara umum merespon isu-isu yang bersumber dari masyarakat sipil ketimbang perekonomian atau negara, membangkitkan isu-isu sehubungan demoralisasi struktur kehidupan sehari-hari dan memusatkan perhatian pada bentuk-bentuk komunikasi dan identitas kolektif.<sup>23</sup> Tujuan GSB adalah menata kembali relasi negara, masyarakat dan perekonomian, dan untuk menciptakan ruang publik didalamnya wacana

---

<sup>21</sup>Ibid. Hal 18.

<sup>22</sup>Ibid. Hal 19.

<sup>23</sup>Ibid. Hal 21.

demokratis ihwal otonomi dan kebebasan individual dan kolektivitas serta identitas dan orientasi mereka, bisa didiskusikan dan diperiksa selalu.<sup>24</sup>

*Keempat*, berbeda dengan gerakan klasik, struktur GSB di defenisikan oleh pluralitas cita-cita, tujuan, kehendak dan orientasi, dan oleh heterogenitas basis sosial mereka. Melebarnya pemisahan negara dari masyarakat sipil dan, secara bersesuaian, kian tersamarnya garis pemisah yang privat dan yang publik merupakan fenomena baru. Lebih jauh lagi, sifat GSB di eksperikan tidak terlampaui pada sosial-politik dan sosial-kultural gerakan. Pergeseran ini bisa di jelaskan oleh fakta bahwa sementara masyarakat industri modern mampu memproduksi alat produksi untuk menciptakan perangkat mekanik, dunia *post-modern* tidak hanya memproduksi “perangkat” namun juga “tujuan” produksi seperti barang-barang simbolik, bahasa (merujuk pada bahasa komputer) dan informasi, demikian kata Touraine.<sup>25</sup>

Peran masyarakat sipil sebagai pilar demokrasi merupakan suatu hal yang dapat dipahami karena aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat sipil mampu membawa rakyat akar rumput ke arah yang lebih partisipatoris. Secara lebih rinci peran masyarakat sipil sebagai pilar demokrasi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Fungsi pendidikan yang dilakukan organisasi masyarakat sipil melalui pemberian informasi mengenai nilai-nilai demokrasi dan partisipasi publik dapat meningkatkan awareness rakyat terhadap suatu proses demokratisasi yang tengah berlangsung.
2. Organisasi masyarakat sipil dapat memunculkan isu-isu yang dapat didiskusikan. Misalnya, isu lingkungan, hak asasi manusia, dan kemiskinan yang nantinya dapat disuarakan kepada pemerintah agar membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
3. Melalui mobilisasi rakyat untuk memaksa sebuah pemerintah lebih transparan dalam menjalankan pemerintahan.

---

<sup>24</sup>Ibid.

<sup>25</sup>Ibid. Hal 22.



4. Melakukan pemantauan terhadap implementasi dan akibat yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan yang diambil di tingkat global. Melalui akuntabilitas demokratik, organisasi masyarakat sipil dapat mendorong otoritas di tingkat global agar lebih bertanggung jawab terhadap publik atas tindakan dan kebijakan yang telah diambilnya.<sup>26</sup>

### **1.7.3. Hegemoni**

Dalam pemaparan nanti, penulis mencoba menggabungkan teori Gramsci dan Neo-Gramscian Robert. W. Cox sebagai teoritis yang konsen dalam membahas teori hegemoni dan counter hegemoni. Gramsci adalah sebagai pijakan awal dari Cox dalam mengamati dan menganalisis dinamika dan isu hubungan internasional.

#### **1.7.3.a Konsensus (*Consensus*)**

Gramsci memberatkan bahwa titik awal dari sebuah hegemoni ialah kondisi dimana bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan konsensus. Dalam catatannya terhadap karya Machiavelli, *The Prince* (Sang penguasa), Gramsci menggunakan mitologi Yunani, yaitu setengah binatang dan setengah manusia, sebagai simbol dari ‘perspektif ganda’ suatu tindakan politik, kekuatan dan konsensus, otoritas dan hegemoni.<sup>27</sup>

Lebih jelas lagi, Gramsci mengatakan bahwa hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan secara politik dan ideologis. Hegemoni adalah suatu organisasi konsensus.

Menurut Antonio Gramsci Hegemoni didefenisikan sebagai moral kepemimpinan (*direzione*) dan intelektual sebagai elemen penyusun utama persetujuan dan persuasi. Sebuah kelompok sosial dan kelas dapat di katakan bisa mengambil peran hegemoni sejauh mereka bisa mengartikulasi dan memproliferasikan seluruh sistem kepercayaan budaya masyarakat dan ideologi

---

<sup>26</sup>Andi Widjajanto, dkk. Transnasionalisasi Masyarakat Sipil. Yogyakarta. PT. LKIS Pelangis Aksara Yogyakarta. 2007. ISBN 979-25-5247-2. Hal 82

<sup>27</sup>Rogers Simon, Gramsci's Political Thought, An Introduction Atonio Gramsci, The Electric Book Company Ltd, London.1999. Hal. 24.

yang ajaran-ajarannya di terima sebagai hal yang berlaku universal dan di terima oleh masyarakat umum.<sup>28</sup>

Dalam pandangan Gramsci, tidak seperti hegemoni yang diterjemahkan Lenin sebagai strategi, Gramsci menekankan hegemoni kepada konsep seperti halnya konsep Marxis tentang kekuatan dan hubungan produksi, kelas dan negara menjadi sarana untuk memahami masyarakat dengan tujuan untuk mengubahnya. Oleh sebab itulah seperti yang telah dikatakan sebelumnya Gramsci sangat menekankan pada gagasan tentang kepemimpinan, karna hal ini sangat penting dalam proses memperoleh kekuasaan negara. Hegemoni merupakan hubungan antar kelas dengan kekuatan sosial lain. Kelas hegemonik, atau kelas kelompok kelas hegemonik, adalah kelas yang mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan kelas lain dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui perjuangan politik dan ideologis. Konsep ideologi ini tidak berdiri sendiri, karna di dukung oleh beberapa konsep lain yang berkaitan dengannya. Gramsci membedakan antara dominasi (kekerasan) dengan kepemimpinan Intelektual :

*A social group can, indeed must, already exercise 'leadership' before winning governmental power (this is indeed one of the principal conditions for the winning of such power); it subsequently become dominant when it exercise power, but if it holds it firmly in its grasp, it must continue to 'lead' as well (SPN)<sup>29</sup>.*

Lebih lanjut, Robert Cox, seorang penteoris Hubungan Internasional sejalan dengan pemikiran Gramsci tentang konsep hegemoninya, ia memakai konsep hegemoni sebagai cara menjelaskan kontrol hegemoni dalam masyarakat-masyarakat kapitalis untuk menerangkan cara bagaimana ide-ide dominan mengenai tatanan dunia membantu mempertahankan pola-pola khusus dari hubungan-hubungan antara kekuatan materi, ide-ide dan institusi-institusi pada suatu level global. Gramsci selalu menempatkan karyanya pada skema Marxis, dimana basis ekonomi menentukan kondisi yang terbatas bagi politik, ideologi, dan negara. Apa yang terutama ditujunya adalah sifat dasar dari hubungan struktur

---

<sup>28</sup>Benedetto Fontana, *Hegemony and power, on the relation between Gramsci and machiavelli*, Copyright 1993 by the regents of the university of minnesota press, Minneapolis london, ISBN 0-8166-2135-7 (alk. paper). Hal. 140.

<sup>29</sup>Roger Simon, Ibid. Hal. 25.

dengan suprastruktur yang rumit, yang menurutnya tidak bisa dikurangi menjadi sekedar sebuah refleksi dari kondisi-kondisi ekonomi yang ditafsirkan secara sempit.<sup>30</sup>

Robert Cox sering mengatakan bahwa “teori selalu untuk seseorang dan untuk beberapa tujuan”.<sup>31</sup> Dengan kata lain, sejalan dengan pemikiran Gramsci sebelumnya, bahwasanya hegemoni yang dibawa melalui dominasi intelektual dan budaya politik merupakan sebuah kemasan yang dibawa oleh pihak hegemon dalam proses merebut kekuasaan tertinggi sehingga terbentuknya sebuah hegemoni yang berjalan dengan stabil.

Bagi Gramsci dan Cox, hegemoni pada level global bukan untuk disamakan dengan dominasi militer semata (sebagaimana pada realisme), juga bukan dianggap sebagai suatu kebaikan yang paling diinginkan oleh banyak orang seperti (dalam neoliberal institusional). Karena bagi Gramsci hegemoni adalah suatu kesatuan dari struktur dan suprastruktur dimana kekuasaan berdasar penguasaan terhadap produksi dirasionalkan melalui ideologi yang menggabungkan kompromi dan konsensus antara kelompok yang berkuasa dan yang subordinat.<sup>32</sup>

Apa yang terjadi dalam sistem hegemonik sehingga mereka yang dikuasai tidak merasa terhegemoni adalah mereka (pihak hegemon) menutupi wajah seramnya dengan cara menawarkan ide-ide tentang kemakmuran, dengan memberikan konsensi-konsensi kepada kelas yang diperintahnya, melalui penerapan ide-ide tentang negara, dan melalui proses-proses normatif yang dipimpin dan digerakkan oleh lembaga-lembaga seperti keluarga, gereja, sekolah, media massa dan seterusnya. Bagi para pengikut Gramsci lembaga-lembaga ini adalah bagian dari organisasi negara.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>Martin Griffiths, lima puluh pemikir studi hubungan internasional, penerjemah : Mahyudin dan Izamudin makmur, Raja Grafindo persada, jakarta. Hal. 159.

<sup>31</sup>Robert Cox, ‘Social Forces, states and World Order : Beyond international relations theory’, *Millenium : Journal of International Studies* 10 (1981), Hal. 128

<sup>32</sup>Robert Cox, ‘Labor and Hegemony’, *International Organization* 31, 1977, hal. 387.

<sup>33</sup>Buku Ajar : Teori-teori Hubungan Internasional, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Andalas, Padang. Hal. 98.

Proses hegemoni seringkali justru menyangkut perebutan pengaruh konsep realitas, dari pandangan mereka yang mendominasi berhasil diambil oleh mereka yang didominasi. Sehingga akibatnya proses hegemoni akan sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan pribadi mereka yang dihegemoni, bahkan berpengaruh pada cita rasa, moralitas, prinsip keagamaan dan intelektual mereka.<sup>34</sup> Mekanisme hegemoni dunia menurut Gramsci bisa melalui lembaga internasional. Di dalam lembaga tersebut terdapat norma-norma dan mekanisme bersifat universal yang akan mengatur dan mempengaruhi tindakan negara-negara anggotanya.<sup>35</sup>

Proses ini disebarluaskan dengan cara memperbesar dan mensahkan kekuasaan kaum borjuis sampai ke tingkat internasional. Ini berbeda dengan anggapan neoliberalis yang membayangkan liberalisasi melalui campur tangan organisasi internasional akan menguntungkan semua negara. Bagi Cox, keterbukaan dan pasar bebas tidak memberi manfaat kepada semua pelaku ekonomi, tapi memperkuat kedudukan pelaku ekonomi dominan. Sistem ini membuka kepada kelas ekonomi dominan untuk memasuki semua negara, memaksimalkan keuntungannya, atas nama untuk membiayai produksi di dalam negeri dan membantu kelompok-kelompok yang lemah. Akan tetapi intinya adalah membuka perdagangan bebas, sebuah ideologi atau norma-norma hegemonik yang memunculkan prinsip-prinsip netralitas dan keadilan bagi semua negara.

Menelusuri karya Karl Polanyi,<sup>36</sup> Robert Cox salah seorang pemikir *Critical Theory* yang banyak berhutang pada Antonio Gramsci atas konsep hegemoninya memusatkan perhatian pada apa yang diistilahkan sebagai “Internasionalisasi negara”. Dengan ini Cox merujuk pada proses di mana institusi-institusi nasional, kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan di

---

<sup>34</sup>Roger Simon. Ibid.

<sup>35</sup>Robert W. Cox with Timothy J. Sinclair. “*Approaches to World Order: Gramsci, hegemony, and international relation: an essay in method*” (1983). Cambridge: University Press. Hal 137

<sup>36</sup>Karl Polanyi (1886-1964) adalah seorang sejarawan ekonomi Hungaria, lahir di Wina 25 oktober 1886

sesuaikan dengan perkembangan struktur dan gerak suatu perekonomian dunia dari produksi kapitalis. Cox mengidentifikasi tiga dimensi dari proses ini, yaitu<sup>37</sup> :

- a) Ada sebuah proses formasi konsensus antar negara mengenai tuntutan dan kebutuhan perekonomian dunia yang mengambil tempat dalam suatu kerangka ideologis umum.
- b) Partisipasi dalam negosiasi mengenai konsensus ini bersifat hirarkis.
- c) Struktur internasional setiap negara di sesuaikan sehingga tiap negara bisa dengan baik merubah konsensus global itu menjadi kebijakan tindakan nasional’.

Cox menegaskan hubungan resiprokal antara struktur (hubungan-hubungan ekonomi – dunia produksi) dan suprastruktur (ranah politis – etis Negara) mengandung unsur-unsur kekuasaan potensial untuk menciptakan blok yang mensejarah, yakni kekuasaan atas entitas-entitas dalam tatanan dunia. Reformasi atas hubungan-hubungan produksi oleh kedua kelompok itu menghentikan pertumbuhan hasrat-hasrat dari kaum proletar dan para pekerja terhadap revolusi. Namun Cox, sebagaimana Marxisme umumnya, yakin perdamaian itu hanya sementara sifatnya dan tidak menghentikan proses-proses sosial yang membutuhkan hasrat para pekerja untuk mewujudkan hasrat masyarakat sosialisme.<sup>38</sup>

Tekanan-tekanan dan ketergantungan-ketergantungan yang diciptakan oleh penerapan manajemen ekonomik oleh Negara, yang didesak oleh adanya kesepakatan-kesepakatan, perjanjian-perjanjian internasional dan pembagian-pembagian kerja antara tugas-tugas ekonomi dan politik, yang menjadi dominan dalam hubungan internasional, terutama setelah keruntuhan Uni Soviet, secara radikal memunculkan tatanan yang tidak biasa, yang diistilahkan oleh Cox sebagai ‘*hyper-liberal globalizing capitalism*,’ dengan semangat yang menggebu-gebu terhadap penegakan demokrasi sekaligus kemunduran demokrasi dalam lembaga-lembaga internasional. Antara tuntutan untuk pelestarian lingkungan dan

---

<sup>37</sup>Robert Cox, *Production, Power, and World Order : Social Force in the Making of History*, New York, Columbia University Press, 1987. Hal. 399.

<sup>38</sup>Robert Cox, dalam Buku ajar Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Andalas, Hal. 99.

menyerahnya aparatus Negara kepada para pelaku bisnis dan penguasa permodalan.<sup>39</sup>

Prosesnya dimajukan oleh pemakaian teknologi perfabrikan dan komunikasi dengan dukungan kebijakan regulasi yang diciptakan untuk memperlemah kekuasaan kekuatan-kekuatan perubahan tradisional, terutama serikat-serikat pekerja. Bentuk-bentuk kongkritnya dapat dijumpai dalam kesepakatan WTO, kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh Reagan dan Thatcher di tahun 1980-an.<sup>40</sup>

### **1.7.3.b Intelektual Organik**

Tugas menciptakan hegemoni baru, berlawanan dengan apa yang dilakukan kaum kapitalis, hanya dapat diraih dengan merubah kesadaran, pola pikir, dan pemahaman masyarakat, konsepsi mereka tentang dunia, serta norma perilaku mereka. Peran intelektual dalam masyarakat sipil dan dalam transisi menuju sosialisme merupakan tema yang dibahas secara luas dalam *Prison Notebooks*. Bahkan Gramsci begitu menekankan arti penting mereka sehingga rencana awal pada *Notebooks* adalah memperjelas sejarah intelektual Italia secara komprehensif.<sup>41</sup>

Ada dua tema yang harus digaris bawahi dari pandangan Gramsci terhadap intelektual. Pertama, perlunya menghapus perbedaan antara kerja manual dan kerja intelektual yang telah berlangsung lama di bawah kapitalisme dalam proses produksi, dalam masyarakat sipil, dan juga aparat negara. Kedua, hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan, watak kekuasaan yang lahir dari sesuatu yang mirip monopoli pengetahuan oleh kelas yang berkuasa dan perlunya perubahan mendasar dalam hubungan antara manusia dan pengetahuan dalam transisi menuju sosialisme.<sup>42</sup>

Pandangan Gramsci tentang kaum intelektual dikemukakan dalam dua catatan yang diletakkan pada bagian awal *Prison Notebooks*. Ia menolak apa yang disebutnya pandangan tradisional dan vulgar terhadap intelektual yang hanya

---

<sup>39</sup>Buku ajar Hubungan Internasional. Ibid. 99-100.

<sup>40</sup>Ibid. Hal. 100.

<sup>41</sup>Roger Simon. Ibid. Hal . 26.

<sup>42</sup>Ibid. Hal. 140.

terdiri dari ahli sastra, filosof dan seniman (termasuk jurnalis, yang mengaku sebagai sastrawan dan filosof, dan menganggap diri mereka sebagai intelektual sejati). Intelektual bukan dicirikan oleh aktifitas berpikir intrinsik yang di miliki semua orang, namun oleh fungsi yang mereka jalankan. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa semua orang adalah intelektual, namun tidak semua orang mempunyai fungsi intelektual.<sup>43</sup>

Gramsci memperluas defenisi intelektual, yaitu semua orang yang mempunyai fungsi sebagai organisator dalam semua lapisan masyarakat, dalam wilayah produksi sebagaimana dalam wilayah politik dan kebudayaan. Ia melakukan dobrakan ganda pandangan umum terhadap intelektual, menurut Gramsci, intelektual bukan hanya pemikir, penulis dan seniman namun juga organisator seperti pegawai negeri dan pemimpi politik, dan mereka tidak hanya berguna dalam masyarakat sipil dan negara namun juga dalam alat-alat produksi sebagai ahli mesin, manajer dan teknisi.

Langkah yang ditempuh Gramsci selanjutnya adalah membuat perbedaan antara intelektual ‘organik’ dan ‘tradisional’. Setiap kelas menciptakan satu atau lebih strata intelektual “yang memberinya kesamaan dan kesadaran akan fungsi mereka sendiri bukan hanya dalam bidang ekonomi namun juga dalam bidang politik” (*Selection of Prisons Notebooks*).<sup>44</sup>

Dalam konsep ini, penulis memfokuskan terhadap intelektual organik yang dikatakan Gramsci tersebut. Gramsci menyadari bahwa dalam mekanisme hegemoni, peran intelektual menjadi begitu penting dan sentral karena mereka dapat disebut sebagai kelas yang memimpin dengan daya persuasi tingkat tinggi. Intelektual organik menjadi konsep penting bagi Gramsci dalam memunculkan kelas tandingan bagi kelas hegemonik.

Intelektual organik sebagai kelas baru memperoleh homogenitas dan kesadaran tentang fungsi mereka sendiri, tidak hanya di bidang ekonomi, tapi juga bidang sosial dan politik. Gramsci menunjukkan alasan kekhususan dari intelektual organik yang secara integral terkait dengan kekhususan kelas yang

---

<sup>44</sup>Ibid. Hal. 141.

memunculkan mereka. Intelektual organik tidak hanya satu jenis, karena proyek kelas yang berbeda mensyaratkan berbagai bentuk organisasi sehingga membutuhkan berbagai jenis intelektual organik. Gramsci menjelaskan organisasi tersebut dalam dua istilah sekaligus, baik secara ideologis maupun praktis. Ia berpendapat, di dunia modern, gerakan kelas pekerja dan pendidikan teknis secara implisit terkait dengan tenaga kerja industri, bahkan dari jenis yang paling primitif, bentuk dasar dari intelektual baru.<sup>45</sup>

Intelektual baru yang dibutuhkan oleh kelas pekerja berbeda jauh dengan intelektual borjuis :

*The mode of being of a new intellectual can no longer consist in eloquence, which is an exterior and momentary mover of feelings and passions, but in active participation in practical life, as constructor, organiser, 'permanent persuader' and not just a simple orator (but superior at the same time to the abstract mathematical spirit) (Selection of Prison Notebooks).<sup>46</sup>*

Dalam pernyataan diatas Gramsci menekankan bahwasanya, intelektual bukan hanya sekedar fasih dalam berbicara, berpidato dan mempunyai semangat menggebu-gebu yang abstrak. Akan tetapi intelektual, harus berpartisipasi aktif dalam kehidupan praktis, yang mampu membawa kelas-kelas yang dihegemoni sebelumnya menjadi kuat dan mampu membuat kelas tandingan baru.

Hubungan intelektual dengan masyarakat bangsa adalah hubungan emosional dan keinginan yang sama dalam menuju emansipasi dalam masyarakat yang menjadi kelas non-hegemonik, mereka selalu memiliki kedekatan yang sangat intim. Gramsci memberikan contoh antara partai revolusioner (kaum intelektual) dan masyarakat. Gramsci tidak hanya menunjukkan arti penting dari kepercayaan masyarakat dan pemikiran awam dalam karya intelektual, tetapi juga arti penting dari hubungan dua elemen tersebut, serta bahaya yang terjadi jika suatu partai kehilangan kontak dengan masyarakat dan menjadi bersifat birokratis atau seperti hubungan penguasa dengan rakyatnya. Salah satu paragrafnya dalam *Prison Notebook* menyatakan bahwa :

---

<sup>45</sup>Donny Gahril Adian, *Setelah Marxisme : Sejumlah Teori Ideologi Kontemporer*, Koekoesan. Depok, 2011. Hal. 45.

<sup>46</sup>Roger Simon. *Ibid.* Hal. 111.



*If the relations between intellectuals and the people-nation, between leaders and led, is the result of an organic participation in which feelings and passion become understanding and thence knowledge .. then and then only is the relation one of representation. Only then can there take place an exchange of individual elements between rulers and ruled, leaders and led, that is to say the realisation of a life in common which alone is a social force, only then is the 'historical bloc' created (SPN).<sup>47</sup>*

Di sini Gramsci menggunakan istilah 'blok historis' dalam pengertian yang berbeda dari arti pokoknya di mana pengertian blok historis itu lebih menjelaskan hubungan antara produksi dan politik. Pandangannya tentang hubungan antara partai revolusioner dan rakyat serta bahaya birokrasi membawa pada persoalan tentang watak dan peran partai revolusioner.

### **1.7.3.c Economic-Corporate Struggle**

Kelas yang lebih rendah hanya dapat menjadi kelas hegemonik dengan cara memperkuat kemampuan untuk memperoleh dukungan dari kelas dan kekuatan sosial lain. Kelas yang lebih rendah harus mulai melampaui aktifitas korporasi dalam lingkungan setempat, yaitu aktifitas ketika mereka hanya peduli dengan kepentingan mereka sendiri yang bersifat sesaat, dan harus bergerak maju menuju fase hegemonik dengan memperhatikan juga kepentingan kelas lain.

Sejauh ini Gramsci hanya memberikan defenisi Marxis klasik terhadap lahirnya sebuah kelas. Sumbangannya yang sangat nyata terlihat pada analisisnya mengenai hubungan berbagai kekuatan politik. Ia mengambil contoh munculnya kelas kapitalis, ia juga memedakan tiga tiingkatan perkembangan kesadaran politik kolektif dan organisasi, dua fase yang pertama adalah fase ekonomi-korporasi, dan yang terakhir fase hegemoni :<sup>48</sup>

1. Fase pertama dan paling awal terjadi ketika seorang pedagang merasa perlu berdiri sejajar dengan pedagang lain, seorang pengusaha dengan pengusaha lain, dan sebagainya, namun pedagang belum merasakan timbulnya solidaritas dari pengusaha. Anggota kelompok profesional sadar akan kepentingan bersama mereka dan perlunya mereka bersatu, namun mereka belum menyadari kebutuhan untuk bergabung dengan kelompok lain ke dalam kelas yang sama.

---

<sup>47</sup>Ibid. Hal. 113.

<sup>48</sup>Roger Simon. Ibid. Hal. 34-35.

2. Fase kedua yang lebih maju adalah fase dimana telah tumbuh kesadaran akan kepentingan bersama semua kelas, namun masih dalam bidang ekonomi. Pada tahapan ini masalah negara sudah diperhatikan, namun hanya sebatas untuk memperoleh persamaan politik dan hukum dengan kelompok yang berkuasa : ‘hak untuk ikut serta dalam penetapan undang-undang dan administrasi, bahkan untuk mengubahnya memang diakui, namun harus tetap berada pada struktur dasar yang ada.
3. Fase ketiga adalah hegemoni, di mana orang menjadi sadar bahwa kepentingan perusahaannya, dalam perkembangan di masa sekarang dan mendatang, melampaui batas-batas korporasi kelas yang bersifat murni ekonomi, dan kepentingan dapat dan harus menjadi kepentingan dari kelompok yang lebih rendah. Ini adalah tahap yang murni politik. Ini adalah fase di mana ideologi-ideologi yang sebelumnya terpecah-pecah sekarang bersaing sampai salah satunya, atau gabungan dari ideologi itu, menang sehingga bisa menyatukan tujuan-tujuan ekonomi, politik, intelektual dan moral serta mampu menghadapi semua persoalan sehingga perjuangan tidak berlangsung dalam dataran korporasi namun dalam dataran universal, yang akhirnya terciptalah hegemoni suatu kelompok sosial yang kuat terhadap kelompok lain yang lebih rendah

Jadi, meskipun kelas hegemoni berkuasa dalam negara, ia tidak memeralat negara semata-mata sebagai alat untuk memaksakan kepentingannya pada kelompok kelas sosial lainnya. Sebaliknya, kehidupan negara di pandang sebagai suatu proses pembentukan dan penggantian keseimbangan yang labil yang di lakukan terus-menerus, yaitu negara dipahami sebagai hubungan yang kompleks dari berbagai kekuatan yang terjadi antara kelas yang kuat dengan kelas dan kekuatan yang lainnya.

Suatu kelas bisa menjadi hegemonik jika mampu melewati fase korporasinya dan berhasil menyatukan kepentingan kelas dan kekuatan sosial lain dengan kepentingannya sendiri, dan berhasil menjadi representasi penuh dari kekuatan sosial utama dalam membangun bangsa. Kelas hegemonik yang berhasil

membangun blok kekuatan sosial yang mampu bertahan sepanjang periode sejarah disebut Gramsci blok historis (*Historical Bloc*).

Dalam memperbincangkan hubungan kekuatan dalam setiap negara, hubungan internasional juga harus diperhatikan, karena ia saling mempengaruhi dan mendukung satu sama lain, akan tetapi Gramsci tetap menyarankan bahwa titik berangkat dari semua itu tetap “nasional”. Karena kenyataannya hubungan internal dari setiap bangsa adalah suatu kombinasi yang asli dan khas, hubungan-hubungan ini harus dipandang dan dipahami dalam keaslian dan kekhasannya jika kita ingin menguasai dan mengarahkannya, dan pasti garis perkembangannya akan menuju internasionalisme, akan tetapi titik berangkatnya harus nasional.<sup>49</sup>

#### **1.7.3.d *Historical Bloc***

Salah satu konsep Gramsci yang paling penting dalam menjelaskan tahapan-tahapan hegemoni adalah *Historical Bloc*. Disatu sisi, konsep *historical bloc*, dalam *prison notebook*, disebut sebagai satu kesatuan antara struktur (sosial-ekonomi) dan super struktur (politik-kultural).<sup>50</sup> Disisi lain, Gramsci menggunakan konsep ini sebagai homogenisasi aliansi politik-ekonomi yang tidak memiliki kontradiksi internal.<sup>51</sup>

Konsep blok historis sangat penting karena mengacu sejenak selama proses perubahan yang menunjukkan bahwa partai politik telah dibangun, dan berusaha untuk membangun hegemoni baru. Gramsci berpendapat, bahwa kelas sosial yang baru ini harus mengatur kelas sosial lainnya melalui partai politik, serta mengambil bagian dalam politik, dan membentuk aliansi ekonomi mereka yang lebih luas, dalam kondisi seperti ini intelektual organik, partai politik dan kelas sosial memainkan peranan penting dalam menghasilkan ide-ide dan argumen persuasif yang diperlukan untuk meyakinkan kelas-kelas lain.

Disisi lain Robert Cox juga menggunakan teori tentang *Historic structure* (atau dalam Gramsci disebut *Historical bloc*). Teori Cox tentang tatanan hegemonic dalam batas-batas tertentu hadir sebagai kritik terhadap kaum

---

<sup>49</sup>Antonio Gramsci, Selection from the Prison Notebooks, The electric Book Company, London. Hal. 240.

<sup>50</sup>Ibid. Hal. 137.

<sup>51</sup>Ibid. Hal. 168.

rasionalis (khususnya neorealis) yang memakai kelas sosial dan aturan-aturan main produksi ditingkat domestik sebagai elemen untuk memajukan kesalingtergantungan global. Cox menyodorkan konsep marxisme tentang relative otonomi guna membuka Negara-negara bagi agen-agen revolusioner untuk terciptanya pergantian politik pada skala global

Namun, seperti yang dikatakan Anne Showstack Sassoon, bahwa blok historis tidak boleh direduksi menjadi aliansi politik semata karena mengansumsikan kontruksi yang rumit di mana bisa ada sub-blok seperti, sebuah blok agraria dan blok industri, masing-masing elemen yang berbeda yang mengandung kontradiksi dan potensial. Blok historis dapat membentuk berbagai blok politik yang terdiri dari kombinasi yang berbeda dari sekutu politik.<sup>52</sup>

Sebuah kelas yang sedang bergerak maju ke arah hegemoni harus berusaha mencapai kepemimpinan dalam bidang produksi : “meskipun hegemoni bersifat etis-politis, ia juga harus bersifat ekonomis, yang dibangun di atas fungsi yang menentukan dari kelompok yang sedang memimpin dalam sektor produksi yang vital”(SPN).<sup>53</sup> Konsep *historical bloc* muncul dari praktik dewan pabrik di Turin, yang mana pada waktu itu meningkatnya gerakan revolusioner besar-besaran di Italia pada tahun 1919-1920.

Disisi lain, Cox juga mengidentifikasi tiga tingkatan historis dalam proses di mana internasionalisasi suatu negara semakin meningkat. Hal ini berkaitan erat dengan konsep *historical bloc* Gramsci, yaitu<sup>54</sup> :

- a. Yang pertama adalah ciri khas 1930-an di mana saat itu negara-negara memiliki hubungan yang kuat dengan perekonomian dunia dan melindungi populasinya dari hal tersebut.
- b. Yang kedua terjadi setelah 1945 dengan terbentuknya sistem Bretton Woods, yang mewakili suatu kompromi antara pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap badan dunia (terutama terhadap sumber-sumber likuiditasnya), dan

---

<sup>52</sup>Anne Showstack Sassoon, *Gramsci's Politics*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987, hal. 121

<sup>53</sup>Roger Simon, *ibid.* Hal. 89.

<sup>54</sup>Martin Griffiths. *Ibid.*

pertanggungjawaban mereka terhadap opini dalam negeri mengenai kinerja ekonomi mereka dan memelihara kesejahteraan negara.

- c. Tingkatan ketiga melibatkan globalisasi negara. Hal ini menandai restrukturasi hubungan antara negara dan perekonomian dunia dan kompromi nasional/internasional demi kepentingan institusi-institusi transnasional dan jaringan kekuasaan yang mendominasi perekonomian dunia saat ini. Internasionalisasi negara menandai sebuah pengikisan lebih jauh terhadap peranannya sebagai penyangga perekonomian dunia dan sebuah peningkatan sumber kekuatan lintas-negara, otoritas dan pembuatan keputusan.

Hegemonik adalah norma-norma sosial yang tidak melulu menyangkut hubungan ekonomi. Ideologi ini juga menjadi alat yang menyatukan bermacam-macam kekuasaan hegemon dari berbagai negara, yang memunculkan apa yang disebut dengan *Transnasional Corporation* (TNC). Dalam pandangan Cox itulah proses munculnya *international historical bloc*. Robert Cox membagi dunia kedalam periode-periode yang menggambarkan kenaikan dan kemunduran tatanan hegemonik : (1) Pan Britanica (1845-1875); (2) berakhirnya tatanan hegemoni Inggris dan munculnya era imperialisme (1875-1945); (3) Pan Americana (1945-1965); (4) berakhirnya hegemoni Amerika Serikat (1965-sampai sekarang).<sup>55</sup>

Tatanan hegemoni dunia muncul ketika kekuasaan sosial hegemonik dalam negara meluas dan mengambil peran dominan dalam tatanan internasional. Secara umum perluasan kekuasaan ini diikuti dengan menguatnya posisi mereka dalam negara. Negara yang dikuasai oleh kelas sosial hegemon lalu membentuk lembaga-lembaga internasional dan rezim-rezim ekonomi untuk melayani dan mensahkan kekuasaan mereka sekaligus memajukan tuntutan-tuntutan kaum borjuis. Ini membentuk suatu tatanan hegemonik yang relatif stabil dalam negara.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Ranny Emilia, Buku Ajar : Teori-teori Hubungan Internasional. Ibid. Hal 103.

<sup>56</sup>Ibid.

Kestabilan ini ditopang oleh beberapa faktor : pertama konflik kelas yang relatif rendah di negara-negara yang memimpin tatanan hegemonik dunia; kedua karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada negara-negara itu, sehingga mematikan hasrat untuk melakukan revolusi. Ketiga karena kekuasaan hegemonik menghubungkan semua kekuatan kapitalis di seluruh dunia melalui aliansi-aliansi kelas yang menguasai modal dan keuangan dunia, yang memberikan kelas hegemonik dalam negara nasional mau mengorbankan sebagian kepentingannya untuk mempertahankan tatanan hegemonik dunia. Keempat karena kekuasaan hegemonik dunia berhasil mempertahankan kestabilan ekonomi dunia. Sebagaimana tatanan hegemonik Inggris, tatanan hegemonik AS, juga menerapkan prinsip-prinsip yang sama yaitu perdagangan bebas (*Free Trade*) dan tingkat pertukaran mata uang yang tetap (*Fixed exchange rates*).<sup>57</sup>

### **1.7.3.e Perang Posisi (*War of Position*)**

Setelah melakukan beberapa fase dalam menuju sebuah hegemoni baru (*Counter Hegemony*). Gramsci mengeluarkan konsep tentang Perang posisi dan perang maneuver. Dalam prosesnya, inilah yang disebut sebagai *counter hegemony* yang mana pada posisi ini kelompok non-hegemonik tadi telah mulai melakukan perlawanan yang nyata terhadap kelompok hegemonik. Dalam konsep ini penulis memakai konsep perang posisi yang ditawarkan Gramsci. Adapun perang posisi diartikan sebagai sebuah kondisi dimana perlawanan dilakukan melalui ide-ide dan nilai-nilai dari kelas non-hegemonik tanpa harus menghancurkan tatanan hegemonik secara struktur. Perlawanan ini diartikan sebagai sebuah cara hidup kelas kaum non-hegemonik yang tidak ingin meniru cara hidup kelas hegemonik tadi.

Gramsci sering menyarankan untuk mengambil strategi ‘perang posisi’ dalam situasi modern seperti sekarang. Ini dikarenakan melihat kondisi masyarakat sipil Eropa Barat yang sudah maju, perang gerakan harus memberi jalan bagi pelaksanaan strategi yang berbeda : yaitu, ‘perang posisi’. Bagi Gramsci, revolusi merupakan proses memperluas hegemoni kelas pekerja dengan membangun sebuah blok sejarah baru dan bukan merupakan sebuah

---

<sup>57</sup>Ibid.

penghancuran total yang berlangsung sesaat yaitu ketika kekuasaan negara lepas dari satu kelas ke kelas lain. Jadi transisi menuju sosialisme terdiri dari dua proses yang berbeda yang saling berkaitan : tumbuhnya hegemoni kelas pekerja, dan transformasi negara menuju bentuk negara sosialis.

Dalam tulisannya, Gramsci memberikan contoh ketika suatu bangsa ditindas oleh bangsa lain akan mengembangkan tradisi perjuangan bagi kemerdekaan nasional, dan memang dalam sejarahnya, setiap warga dari suatu bangsa mengembangkan gagasan yang kuat seperti patriotisme dan nasionalisme yang sebagaimana dikatakan Gramsci, dapat menjadi kekuatan spiritual rakyat. Kelas hegemoni adalah kelas yang berhasil menggabungkan perjuangan dan gagasan patriotik ini dengan kepentingan kelas mereka untuk meraih kepemimpinan nasional.

Di mana ada kekuasaan, di sana muncul perlawanan terhadapnya. Relasi sosial masyarakat sipil, dengan demikian, telah menimbulkan, bukan hanya perjuangan kelas, tetapi juga berbagai gerakan sosial yang terlibat dalam perjuangan demokrasi-rakyat yang tidak mempunyai karakter kelas.

Di samping perjuangan bagi kebebasan sipil, terdapat banyak gerakan sosial lainnya yang tidak harus mempunyai karakter kelas. Misalnya gerakan-gerakan yang mengekspresikan tuntutan perempuan, mahasiswa, pemuda, minoritas etnis, gerakan anti-nuklir, berbagai gerakan ekologi yang peduli dengan lingkungan, aktifitas masyarakat dari berbagai kalangan yang menaruh perhatian pada masalah kesehatan, pendidikan, perumahan dan masalah lainnya. Apa yang menyamakan semua gerakan-gerakan ini adalah gerakan-gerakan tersebut muncul dari hubungan produksi

Perjuangan-perjuangan ini mempengaruhi watak dan lembaga-lembaga negara dan organisasi-organisasi masyarakat sipil, yang mengakibatkan bahwa perjuangan itu bukan semata-mata instrumen kelas penguasa, namun juga mencerminkan perimbangan kekuatan dalam masyarakat sipil. Gramsci membandingkan organisasi-organisasi masyarakat sipil dengan sistem benteng dan pertahanan yang kuat yang berdiri di belakang negara. Pada tahun 1917 di Rusia, di mana masyarakat sipil masih primordial dan belum maju, melakukan

perlawanan frontal terhadap negara, yang disebutnya ‘perang gerakan’ bisa berhasil.

Namun dalam masyarakat kapitalis yang maju di mana masyarakat sipil sudah berkembang, perang gerakan yang terjadi di Rusia tersebut tidak relevan lagi, perlu strategi baru, yaitu perang posisi, kelas pekerja harus membongkar sistem benteng dan pertahanan yang mendukung hegemoni borjuis dengan membangun aliansi dengan semua gerakan sosial yang sedang berusaha mengubah relasi-relasi dalam masyarakat sipil. Kekuasaan hegemoni kaum borjuis melalui organisasi-organisasi dalam masyarakat sipil harus diperlemah dengan kekuatan balik dari gerakan-gerakan sosial yang berasal dari aktivitas anggota gerakan tersebut, yang bersatu di bawah kepemimpinan kelas pekerja.

Meski struktur ekonomi, mungkin bersifat menentukan, Gramsci memberi otonomi lebih besar kepada pengaruh-pengaruh aktual dari perjuangan mencapai kepemimpinan, dari berbagai macam tempat dan institusi. Dia menyatakan bahwa peran partai komunis adalah terlibat dan memimpin suatu perjuangan besar dan memiliki berbagai segi demi ‘hegemoni’. Sebuah perubahan dalam strategi politik sosialis sangat diperlukan, dari suatu serangan frontal terhadap sebuah negara sehingga memenangkan posisi-posisi strategis di sejumlah front. Perjuangan sosialis dianggap sebagai sebuah “perang posisi” pertama melawan kekuatan-kekuatan hegemoni kapitalis dalam masyarakat dan budaya sipil.

Sejalan dengan Gramsci, bagi teori teori kritik, yang disini diwakili oleh Cox mengatakan bahwa ketidakharmonisan dan ketidakadilan dalam dunia produksi hingga memudahkan legitimasi kelas borjuis dan keabsahan Negara untuk memerintah. Untuk mempertahankan kekuasaannya mereka memakai kekerasan dan teknik-teknik paksaan yang memberi ruang untuk memunculkan tatanan non-hegemonik didalam negeri dan akhirnya membentuk tatanan non-hegemonik di tingkat dunia.<sup>58</sup>

Cox, dalam skema dasar teori kritiknya menjelaskan akhir sebuah hegemon, ia menjelaskan bahwa dalam jangka panjang, kotradiksi sosial dalam

---

<sup>58</sup>Buku Ajar Hubungan Internasional. *Opp, citt.* Hal. 104.



tatanan dunia hegemonik semakin mengecilkan arti tatanan hegemonik dan blok historis yang spesifik di tingkat negara-negara nasional. Tatanan non-hegemonik menjadi naik dengan munculnya konflik-konflik yang semakin jelas. Karena negara-negara telah memainkan peran utama dalam memudahkan proses globalisasi, Cox menyatakan bahwa kekuatan-kekuatan sosial yang kontra hegemoni harus berada pada posisi perang. Globalisasi dari atas harus dilawan dengan globalisasi dari bawah. Dan kekuatan-kekuatan sosial harus memadukan aliansi agar bisa menjadi lebih besar dalam proses menandingi kelas penguasa (kelas hegemonik).

## **I.8. Metodologi Penelitian**

Metodologi dalam sebuah penelitian digunakan sebagai prosedur bagaimana pengetahuan tentang fenomena yang ada dapat diperoleh. Metode penelitian juga membantu penulis untuk melakukan penelitian secara sistematis dan konsisten, sehingga nantinya akan di dapatkan data dan hasil penelitian yang baik seperti yang diharapkan.

### **I.8.1. Batasan Penelitian**

Berpedoman pada judul dalam penulisan ini, yaitu “Gerakan Pertanian Organik Sumatra Barat Sebagai Gerakan *Counter Hegemoni* Liberalisasi Pertanian Global Di Indonesia”. Maka penulis melakukan penelitian di beberapa daerah di Sumatra Barat, diantaranya ; Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. 50 Kota, Kab. Solok, dan Kab. Pesisir Selatan yang sudah dimasuki oleh gerakan pertanian organik Sumatra Barat.

Dalam tulisan ini, penulis membatasi penelitian dengan hanya mencoba menganalisis dari mulai dibentuknya WTO-AoA yang memunculkan sebuah gerakan pertanian di Sumatra Barat sampai sekarang. Walaupun sebenarnya liberalisasi pertanian sudah dimulai semenjak diberlakukannya revolusi hijau, akan tetapi demi kesamaan dengan judul dan isi tulisan ini, maka penulis mencoba membatasinya.

Dalam tulisan ini, penulis memilih teori postpositivist dengan menggunakan konsep hegemoni Gramsci yang dalam studi Hubungan

Internasional coba dipopulerkan salah satunya oleh Robert Cox. Cox sendiri termasuk ke dalam penstudi teori kritik dan juga seorang Neo-Gramscian.

### **I.8.2. Metode Penelitian**

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif interpretatif, artinya sifat data yang dikumpulkan berupa penggalian nilai-nilai yang dipercaya dan dilakukan pelaku melalui gerakan pertanian organik tersebut. Sesuai dengan hakikatnya, interpretasi adalah penafsiran. Interpretatif adalah menguraikan sesuatu yang ada dibalik data yang ada.<sup>59</sup>

Ada empat langkah yang dilakukan oleh peneliti. Pengumpulan data, sebagai proses pertama dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang gerakan pertanian organik di Sumatra Barat. Proses kedua menyederhanakan data yang telah dikumpulkan tadi agar lebih mudah dianalisis. Proses ketiga adalah melakukan deskripsi secara terstruktur yang memungkinkan melakukan proses keempat, yaitu mengambil kesimpulan itu sendiri.<sup>60</sup> Kesimpulan data tadi diambil melalui pemberian makna, baik secara etik maupun emik.

### **I.8.3. Unit dan Level Analisis**

Unit analisis merupakan suatu unit sosial yang digunakan oleh penulis dalam mengukur sebuah variabel, unit analisis merupakan satuan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kelompok, kelompok di sini diartikan sebagai sebuah kesatuan yang masuk dalam lingkaran gerakan tersebut. Adapun elemen-elemen yang bersatu tersebut adalah Persatuan Petani Organik (PPO) Sumatra Barat, Lembaga keuangan Mikro Agribisnis (LKMA), Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S), NGO FIELD Indonesia, dan kelompok mahasiswa yang diwakili oleh Komunitas Kajian Kritis Limau Manih (KAKI LIMA), dan petani akar rumput yang tergabung dalam Kelompok Tani (Keltan). Sedangkan level analisis dalam penelitian ini mengambil Rezim Internasional (Sistem Internasional) dalam wujud *World Trade Organization* (WTO) yang didalamnya terdapat ratifikasi tentang AoA dan dikelilingi oleh

---

<sup>59</sup>Prof. Nyoman Kutha Ratna, SU, Metode penelitian : Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hal. 307.

<sup>60</sup>Ibid. Hal. 310.

kekuasaan Negara-negara Utara dan Perusahaan bisnis global (TNC/MNC) yang di dukung oleh World Bank dan *Internastional Moneterary Fund* (IMF).

#### **I.8.4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.<sup>61</sup>

Data Primer adalah data utama yang terdapat dalam penelitian ini dan ini diperoleh melalui teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan informan dari pengalaman lapangan tentang bagaimana kemunculan pertanian organik di Sumatra Barat. Sementara itu data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis maupun melalui studi kepustakaan atau hasil penelitian yang relevan

Data sekunder adalah data kedua yang diambil seandainya wawancara tidak memadai dalam pengumpulan data, dengan ini peneliti bisa mengambil dokumen-dokumen yang terdapat di dalam kelompok-kelompok yang peneliti mau amati dan menganalisisnya, pengujian keaslian dokumen dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut. Pertama peneliti harus melakukan penelitian terhadap dokumen yang di kumpulkan. Kualitas dokumen dapat diliat dari empat komponen berikut :

- a) *Otentik*, yaitu keaslian dan asal dokumen tersebut tidak diragukan.
- b) *Kredibel*, yaitu dokumen yang digunakan bebas dari kesalahan dan penulisnya dapat dipercaya.
- c) *Representatif*, yaitu apakah dokumen yang digunakan adalah dokumen yang biasa dijumpai atau langka, apakah banyak dokumen lain yang sejenis, semakin banyak dokumen yang berisi hal yang sama membuat proses verifikasi lebih muda.

---

<sup>61</sup>Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. 2005. Hal 62

d) *Makna*, yaitu apakah dokumen yang didapat jelas dan dapat dipahami. Makna juga merujuk pada dokumen seharusnya dibaca dan diinterpretasikan.

. Teknik pengumpulan data<sup>62</sup> yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi Partisipatif

Peneliti memakai teknik observasi partisipasi dikarenakan peneliti terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati peneliti sendiri. Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu, yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang hendak dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat di dengar, dapat di hitung, dan dapat diukur.<sup>63</sup> Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah melakukan observasi selama kurang lebih dua tahun, yang dilakukan semenjak tahun 2010. Peneliti telah sering turun ke lokasi pertanian organik yang ada di Sumatra Barat untuk melakukan pemberdayaan, sekedar mencari informasi, membantu FIELD Indonesia dan menjadi panitia dari GAPO I di Padang sampai GAPO III di Pesisir Selatan seperti yang dilakukan PPO Sariak Alahan Tigo, Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Keltan Rezki Abadi, Kelok Jaya, Kabupaten Pesisir Selatan, Keltan Selaras Alam, Lasi, Kabupaten Agam, P4S Kayu Gadang, Limau Manih Selatan, Kota Padang, dan Padang Pariaman yang merupakan wilayah kerja pemberdayaan FIELD Indonesia program Bumi Ceria

b. Wawancara

Peneliti langsung turun ke lapangan untuk menggali informasi dari pelaku pertanian organik di Sumatra Barat dengan metode wawancara satu-persatu dengan menemuinya di tempat yang telah dijanjikan sebelumnya.

---

<sup>62</sup>*Ibid*, Hal 72

<sup>63</sup>*Ibid*, Hal 131-132

Wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagai aturan tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe wawancara tidak terstruktur, karena pertanyaannya bersifat terbuka, fleksibel, dengan kecepatan wawancara yang sulit diprediksi, dan pertanyaan wawancara sangat longgar urutan pertanyaan, penggunaan kata, dan alur pembicaraannya. Dimana tujuan wawancara nantinya adalah untuk memahami fenomena munculnya pertanian organik di Sumatra Barat dan pengaruh *Agreement on Agriculture* terhadap petani khususnya di Sumatra Barat.<sup>64</sup>

c. Telaah Dokumen

Dalam penelitian kualitatif, selain wawancara, *Focus Group Discussion*,<sup>65</sup> dan observasi, data dapat juga di peroleh dengan cara menelaah dokumen. Dokumen adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia.<sup>66</sup>Dokumen yang di maksud adalah segala catatan baik berbentuk catatan dalam kertas (*Hardcopy*) maupun elektronik (*Softcopy*). Dokumen dapat berupa buku, artikel media massa, catatan harian, manifesto, undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto, dan lainnya.<sup>67</sup> Dokumen ini digunakan jika peneliti yang ingin mendapatkan informasi mengenai suatu peristiwa tetapi mengalami kesulitan untuk mewawancarai langsung para pelaku.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis juga banyak menggunakan fasilitas dokumentasi seperti : dokumen-dokumen ratifikasi AoA, IMF, World Bank, UU dan PP RI yang berkaitan dengan Pengesahan *Agreement on Agriculture* (AoA), Kerangka acuan Galanggang Alam Pertanian Organik (GAPO), materi Sekolah Lapangan pertanian organik, buku

---

<sup>64</sup>Haris Herdiansyah. *Op.Cit.* Hal 124-125

<sup>65</sup>Dalam Teknik pengumpulan data, Wawancara dan Focus Discussion Group adalah termasuk dalam teknik wawancara, bedanya FGD merupakan wawancara yang di lakukan terhadap beberapa orang dalam kelompok dan berlangsung secara resmi, dengan akhirnya penulis memilih wawancarasiswa sebagai pilihan dikarenakan kemudahan dalam penelitian.

<sup>66</sup>Esterberg. (2002)

<sup>67</sup>Ibid. Hal 61.

panduan tentang pertanian organik dan sejarahnya, serta video-video dokumenter, seperti “jejak racun” dan Bisa dewek”.

### **I.8.5. Teknik Pemilihan Informan**

Teknik yang digunakan adalah teknik *purposive*, *Purposive* merupakan mekanisme penarikan informan secara disengaja berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian, dimana peneliti menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang harus dimiliki oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi, kriteria tersebut harus menjamin validitas data yang akan dikumpulkan.<sup>68</sup> Kriteria yang dipilih oleh peneliti adalah : (i) informan harus tergabung dalam PPO, P4S, LKMA, FIELD Indonesia, Komunitas KAKI LIMA. (ii) informan harus orang-orang penting dari kelompok tersebut, seperti ketua atau sekretaris organisasi. (iii) petani akar rumput dari kelompok tani organik yang berada dibawah PPO

Dalam penelitian kualitatif yang terpenting dalam prosedur sampling adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian.<sup>69</sup> Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah ketua PPO, Ketua P4S (PBR), Pendiri LKMA, Sekretaris NGO FIELD Indonesia program Bumi Ceria, dan Ketua Komunitas Kajian Kritis Limau Manih (KAKI LIMA) yang terlibat langsung dalam gerakan pertanian organik ini. Sedangkan informan biasa adalah para petani akar rumput yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani yang berada dibawah naungan PPO. Informan yang dipilih sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah para petani yang dikategorikan sebagai petani intelektual (intelektual organik) yang berstatus sebagai anggota Persatuan Petani Organik (PPO) Sumatra Barat dan organisasi aliansi gerakan yang ada diatas. Alasan mengapa orang-orang ini dijadikan sebagai informan kunci adalah karena mereka dianggap mengerti tentang sejarah kemunculan gerakan pertanian organik, hal ini disebabkan mereka merupakan generasi pertama yang membawa prinsip pertanian organik ini ke Sumatra Barat dan ikut dalam proses pengembangannya sampai sekarang.

---

<sup>68</sup>Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta : Penerbit Salemba Humanika. 2012. Hal 106

<sup>69</sup>Burhan Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003. Hal 53

Sedangkan informan biasa adalah petani-petani yang hanya tergabung dalam kelompok tani (Keltan) yang tersebar diberbagai daerah di Sumatra Barat. Adapun informan yang dipilih adalah :

Tabel 1.2 Daftar Informan

No.	Daerah (Kab./Kota)	intelektual organik (Kunci)	Petani (Biasa)
1.	Kota Padang	Fauzan Azim (P4S), Mussadiqi (Komunitas KAKI LIMA)	Katar.
2.	Kab.Pdg. Pariaman	Marsilan (PPO), Kuswara, Suhatri Isra (Field Indonesia)	Kartini.U.
3.	Kab. Solok	Harendra Pakie, Hesri Yeldi (PPO)	Rosina, Defi Susanti, Israyati.
4.	Kab. Pesisir Selatan		Thamrin, Chairul.
5.	Kab. 50 Kota	Feirizal Ilyas (P4S)	
6.	Kab. Agam	Boy, Jafrinal (PPO), Masril Koto (LKMA)	

Sumber : Penulis

### **I.8.6. Model Analisis**

Sejalan dengan metode interpretatif yang digunakan peneliti, maka dalam menentukan model analisis peneliti menggunakan analisis emik dan etik. Menganalisis adalah melakukan proses dengan cara mengungkapkan kembali semua proses pengumpulan data (emik), menganalisisnya melalui tanggapan peneliti (etik), kemudian menyimpulkan (emik dan etik). Dalam memperoleh kesimpulan, baik dalam kaitannya dengan sub-kelompok data yang secara kasat mata tampak dalam bab dan sub-bab, maupun analisis data secara keseluruhan jelas kedua data harus digabungkan. Artinya, seolah-olah berbeda dipertemukan kembali dengan memberikan ruang lingkup secara proporsional sehingga makna dapat ditampilkan secara maksimal.

Dalam prosesnya peneliti mengelompokkan emik sebagai budaya, praktik pertanian organik dan nilai-nilai yang ada pada pelaku pertanian organik itu

sendiri. Sedangkan etik adalah pengelompokkan sesuai dengan teori yang digunakan dan dipahami peneliti. Seperti menentukan siapa intelektual organik, yang mana blok historis, fase ekonomi-korporasi, mana yang konsensus, dan bagaimana bentuk counter hegemoni yang dilakukan.

Istilah yang dilakukan peneliti disebut juga dengan pendekatan dari dalam (*insider*) yaitu cara yang mengandaikan bahwa data sejak dikumpulkan dilapangan hingga berada di meja peneliti diberikan tempat utama. Dikondisikan sebagai objek yang harus dilakukan sebagai hakikatnya. Baik secara teoritis maupun praktis, peneliti seolah-olah melupakan bagian integral objek dan lokasi penelitian. Peneliti bertanggung jawab secara moral, kultural, dan intelektual terhadap keseluruhan unsur yang melatarbelakanginya. Perbedaannya, apabila di lapangan model hubungan terjadi bentuk faktual, observasi, wawancara, dan telaa dokumen. Sedangkan dalam proses analisis model hubungan yang dimaksudkan berada dalam diri peneliti. Pada umumnya disinilah terjadi pergeseran sudut pandang. Peneliti seolah-olah menjadi penguasa, sebagai wasit dengan teori-teorinya secara bebas memperlakukan data sehingga keluar dari hakikatnya.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>Prof. Nyoman Kutha Ratna, SU. *Op. Cit.* hal. 390.